

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dianggap sebagai investasi yang paling berharga dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya insani untuk pembangunan suatu bangsa. Sering kali, kebesaran suatu bangsa diukur dari sejauhmana masyarakatnya mengenyam pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang dimiliki oleh suatu masyarakat, maka semakin majulah bangsa tersebut. Kualitas pendidikan tidak saja dilihat dari kemegahan fasilitas pendidikan yang dimiliki, tetapi sejauhmana output (lulusan) suatu pendidikan dapat membangun sebagai manusia yang paripurna, sebagaimana tahapan pendidikan tersebut.¹

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah pendidikan, sehingga kualitas pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, pada tempatnyalah kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui berbagai program pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi (iptek), dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan (imtak).²

¹ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 287

²E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 3-4.

Sumbangan pendidikan tersebut terhadap pembangunan bangsa tentu bukan hanya sekedar penyelenggaraan pendidikan, tetapi pendidikan yang bermutu, baik dari sisi input, proses, output, maupun outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, dan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Output pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dan outcome pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.³

Menurut Sallis, dalam buku manajemen teori, praktek dan riset, menyebutkan sebagian besar rendahnya mutu disebabkan oleh buruknya manajemen dan kebijakan pendidikan. Warga sekolah hanyalah pelaksana belaka dari kebijakan yang telah ditetapkan atasannya, pendapat Sallis ini mendukung pendapat Juram, salah seorang Begawan mutu dunia. Juran berpendapat bahwa masalah mutu 85% ditentukan oleh manajemennya, sisanya oleh faktor lainnya.⁴

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.⁵

³ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 288

⁴ Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 496

⁵ Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang RI No.20, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Fokusmedia, 2005), hlm. 95

Pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Secara kuantitas, kemajuan pendidikan di Indonesia cukup menggembirakan, namun secara kualitas, perkembangannya masih belum merata.

Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan, karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut manajemen pendidikan yang lebih baik.⁶ Lemahnya manajemen pendidikan memberi dampak terhadap efisiensi internal pendidikan dari sejumlah peserta didik yang putus sekolah atau tinggal kelas.

Dewasa ini, manajemen pendidikan di Indonesia mengenal dua mekanisme pengaturan yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Yang perlu ditegaskan bahwa implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota untuk mengolah pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan diadakannya otonomi pendidikan. Otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar sekolah lebih tanggap terhadap kebutuhan

⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 21

lingkungan setempat.⁷ Otonomi juga diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Jadi, otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.⁸

Ketentuan otonomi daerah yang dilandasi Undang-Undang no 22 dan 25 tahun 1999, dan direvisi menjadi UU RI no. 32 tahun 2004 dan UU RI tahun 33 tahun 2004, telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk penyelenggaraan pendidikan, bila sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat, dengan berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan tersebut dialihkan ke pemerintah kota dan kabupaten. Sehubungan dengan itu, manajemen berbasis sekolah ada empat isu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional yang perlu dikonstruksi dalam rangka otonomi daerah, berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, efisiensi pengelolaan pendidikan, serta relevansi pendidikan dan pemerataan pelayanan pendidikan sebagai berikut:

Pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standart kompetensi pendidikan, yaitu melalui consensus nasional antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat. *Kedua*, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan mengarah pada pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dengan memberi kepercayaan yang lebih luas kepada sekolah untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia bagi tercapainya tujuan

⁷ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan “Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan”*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), hlm. 82

⁸ *Ibid*, hlm. 76

pendidikan yang diharapkan. *Ketiga*, peningkatan relevansi pendidikan mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat. *Keempat*, pemerataan pelayanan pendidikan mengarah pada pendidikan yang berkeadilan.⁹

Otonomi pendidikan merupakan suatu bentuk reformasi yang perlu dijalankan dengan baik. Dengan reformasi, perbaikan kualitas pendidikan menuntut tingginya kinerja lembaga pendidikan dengan mengacu pada perbaikan mutu yang berkelanjutan, kreativitas, dan produktivitas pegawai (guru). Kualitas bukan saja pada unsur masukan (Input), tetapi juga unsur proses, terutama pada unsur keluaran (Output) atau lulusan, agar dapat memuaskan harapan masyarakat pelanggan pendidikan. Dengan konsep sistem, maka input, proses dan output memiliki hubungan yang saling mempengaruhi untuk mencapai kepuasan pelanggan atau sesuai harapan masyarakat.¹⁰

Pemberian otonomi pendidikan yang luas pada sekolah merupakan kepedulian pemerintah terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakat serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Pemberian otonomi ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di sekolah agar dapat mengakomodasi seluruh keinginan sekaligus memberdayakan sebagai komponen masyarakat secara efektif guna mendukung kemajuan serta sistem yang ada di sekolah.

Dalam kerangka inilah, manajemen berbasis sekolah/madrasah tampil sebagai paradigma baru pengembangan pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan sekolah/madrasah dan kebutuhan daerah masing-masing. Selain itu, manajemen berbasis sekolah/madrasah merupakan suatu konsep yang

⁹ E. Mulyasa, *Op.Cit*, hlm. 6-7

¹⁰ Syafaruddin, *Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan: Konsep, Strategi dan Aplikasi* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 20.

menawarkan otonomi kepada daerah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Manajemen berbasis sekolah/madrasah juga merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mencapai keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi secara berkualitas dan berkelanjutan baik secara makro, meso, maupun mikro. Kerangka makro erat kaitannya dengan upaya politik yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, aspek meso erat kaitannya dengan kebijakan daerah tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten, sedangkan aspek mikro melibatkan seluruh sektor dan lembaga pendidikan yang paling bawah, tetapi terdepan dalam pelaksanaannya, yaitu sekolah/madrasah.¹¹

Pada umumnya, dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/madrasah harus menentukan salah satu fokus arah dan tujuan secara jelas, yaitu bagian mana kinerja sekolah/madrasah yang akan ditingkatkan. Sulit untuk meningkatkan kinerja sekolah/madrasah secara umum tanpa adanya arah yang jelas. Apakah akan terfokus pada mutu belajar siswa, mutu manajemen sekolah, mutu pendidikan, mutu personel, mutu pengelolaan keuangan, dan lain-lain.¹²

Sedangkan tujuan utama manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Adapun yang dimaksud dengan peningkatan efisiensi adalah diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan

¹¹ E. Mulyasa, *Op.Cit*, hlm. 11

¹² Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2003), hlm. 4

birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Sedangkan pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.¹³

Dan tujuan utama manajemen berbasis sekolah/madrasah di atas telah tertuang di dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS butir (c):

Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.¹⁴

Di samping itu pula, penjelasan tentang tujuan utama manajemen berbasis sekolah/madrasah tersebut telah tertuang dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional bab IV pasal 8 bagian ketiga tentang hak dan kewajiban masyarakat, bab XI pasal 40 ayat 2 butir b tentang pendidik dan tenaga kependidikan, dan bab XIV pasal 51 ayat 1 tentang pengelolaan pendidikan yang akan kami sebutkan di bawah ini:

1. Pasal 8, bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

¹³ *Ibid*, hlm. 13

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20. Tahun: 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 1-2

2. Pasal 40 ayat 2 butir b, bahwa pendidikan dan tenaga pendidikan berkewajiban “mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.
3. Pasal 51 ayat 1, bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.¹⁵

Secara umum, manajemen berbasis sekolah/madrasah dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah/madrasah dan mendorong pengambilan keputusan secara partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah/madrasah (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb) untuk meningkatkan mutu sekolah/madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Dengan pendekatan ini, sekolah/madrasah memiliki kewenangan dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan fleksibilitas sekolah/madrasah akan lebih aktif dalam mengelola sumber daya sekolah/madrasah secara lebih optimal.

Adapun alasan atau landasan berfikir yang mendorong penulis untuk menulis tesis ini adalah dengan mengambil pokok masalah tentang Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah di antaranya adalah:

1. Penyelenggara pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik, sehingga menempatkan sekolah/madrasah sebagai penyelenggara pendidikan yang sangat bergantung pada keputusan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 9, 28, dan 34

birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah/madrasah setempat, sehingga sekolah/madrasah kehilangan kemandirian, motivasi dan inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

2. Peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya lebih bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan.¹⁶

3. Pelaksanaan manajemen berbasis sekolah/madrasah sesungguhnya memerlukan tenaga yang memiliki ketrampilan yang memadai, minimal mampu mengelola dan mengerti prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah, karena selama ini tenaga yang ada, baik di tingkat sekolah/madrasah maupun di tingkat pengawas kurang memiliki ketrampilan dalam profesi mereka.¹⁷

Dalam sistem pendidikan Nasional, tentang pendidikan dasar bahwa kedudukan sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah adalah setara dengan sekolah/madrasah yang sederajat, dan mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan Nasional, yakni manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun eksistensi madrasah dalam sistem pendidikan Nasional telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28

¹⁶ H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 82

¹⁷ E. Mulyasa, *Op. Cit*, hlm. 61

tahun 1990 tentang pendidikan dasar (MI dan MTs) dan peraturan pemerintah No 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah.

Agar peran sekolah/madrasah dalam sistem pendidikan Nasional tetap eksis dan semakin besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, maka diadakan reformasi pendidikan, yakni salah satunya dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah. Dengan pendekatan ini, diharapkan menjadi modal yang bisa mengurangi campur tangan pemerintah dalam manajemen pendidikan yang dianggap telah mengurangi hak sekolah/madrasah dalam proses peningkatan mutu pendidikan dan kemandirian sekolah/madrasah dalam mengelola sekolah/madrasah. Dengan ini, diharapkan sekolah/madrasah lebih mandiri dalam melakukan kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

SMP Negeri I Diwek Jombang terletak di Jl. Bandung Ceweng Diwek Jombang, merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang sederajat dengan madrasah tsanawiyah. SMP Negeri I Diwek merupakan salah satu sekolah unggul di desa ceweng dan sekitarnya, serta sekolah yang berkewajiban untuk membekali siswa dalam mencintai puspa dan satwa. SMP Negeri I Diwek memiliki semangat untuk mengembangkan dan melaksanakan manajemen berbasis sekolah. Dengan pengaturan manajemen sekolah yang semakin baik, SMP Negeri I Diwek berusaha menjadikan sekolah menjadi lembaga yang mampu mencetak peserta didik yang bermutu dan mampu bersaing di tengah proses informatisasi dan persaingan global yang semakin pesat.

Sedangkan MTs Negeri Keras Diwek terletak di Jl. PP. Al-Asy'ari Tromol Post I Cukir, merupakan salah satu lembaga formal yang sederajat dengan sekolah

menengah pertama (SMP). MTs Negeri Keras Diwek merupakan salah satu madrasah unggul di desa keras dan sekitarnya, serta madrasah yang bercirikan pesantren. MTs Negeri Keras Diwek memiliki semangat untuk mengembangkan dan melaksanakan manajemen berbasis madrasah. Dengan pengaturan manajemen madrasah yang semakin baik, MTs Negeri Keras Diwek berusaha menjadikan madrasahny menjadi lembaga yang mampu mencetak peserta didik yang bermutu dan mampu bersaing di tengah proses informatisasi dan persaingan global yang semakin pesat.

Berdasarkan fenomena di masyarakat, bahwa SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini didasarkan pada eksistensi kedua lembaga tersebut yang mampu menarik animo masyarakat, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk menyekolahkan anak-anaknya di lembaga tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut melalui pendekatan teoritis dan empiris. Maka dari itu, penulis memilih judul “**IMPLEMENTASI MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH/MADRASAH DI SMP NEGERI I DIWEK DAN MTS NEGERI KERAS DIWEK JOMBANG**”.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah di SMP Negeri 1 Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang, dan sebelum menentukan komponen apa saja yang akan diambil

dalam penelitian ini, maka sebaiknya penulis mengungkapkan semua komponen yang terdapat dalam manajemen berbasis sekolah/madrasah.

Adapun komponen-komponen dalam manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

1. Manajemen kurikulum dan pengajaran
2. Manajemen tenaga kependidikan
3. Manajemen kesiswaan
4. Manajemen keuangan dan pembiayaan
5. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan
6. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, dan
7. Manajemen layanan khusus.

Dengan demikian, penulis hanya menentukan dua aspek batasan masalah agar pembahasan tidak terlalu jauh melebar dari tujuan, sehingga akan memudahkan penulis dalam membahas serta menyusun hasil penelitian ini.

Adapun ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manajemen kurikulum dan pengajaran
2. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitiannya adalah:

1. Bagaimana Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah di SMP Negeri 1 Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah di SMP Negeri 1 Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang.
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah di SMP Negeri 1 Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah di SMP Negeri 1 Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang.
2. Mendeskripsikan persamaan dan perbedaan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah di SMP Negeri 1 Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang.
3. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah di SMP Negeri 1 Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang.

E. Kegunaan Penelitian

Setelah menentukan tujuan, selanjutnya menentukan kegunaan penelitian atau manfaat dilaksanakannya suatu penelitian, baik untuk pengembangan teori, bagi peneliti maupun khalayak umum.

Adapun dalam penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, adalah sebagai pengetahuan dalam dunia pendidikan. Khususnya tentang manajemen berbasis sekolah/madrasah.
2. Bagi sekolah, adalah sebagai pengetahuan dalam mengembangkan kualitas pendidikan, khususnya tentang manajemen berbasis sekolah/madrasah.
3. Bagi khalayak umum, adalah sebagai pengetahuan atau informasi untuk menambah partisipasi, menambah wawasan tentang khazanah keilmuan khusus dan kepedulian terhadap masyarakat.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dilakukan untuk mengatur penyajian laporan penelitian. Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Teori. Bab ini berisi tentang konsep manajemen berbasis sekolah/madrasah, implementasi manajemen berbasis sekolah/madrasah, dan faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen berbasis sekolah/madrasah.

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode penentuan sampel atau subyek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen, serta teknik analisis data.

BAB IV: Paparan data hasil penelitian, bab ini berisikan tentang profil SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang, implementasi manajemen berbasis sekolah/madrasah di SMP Negeri

I Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang, faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi berbasis sekolah di SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang.

BAB V: Pembahasan dan analisis hasil penelitian. Bab ini berisikan tentang implementasi manajemen berbasis sekolah/madrasah di SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang, perbedaan dan persamaan implementasi berbasis sekolah/madrasah di SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang, dan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi berbasis sekolah/madrasah di SMP Negeri I Diwek dan MTs Negeri Keras Diwek Jombang, dan

BAB VI: Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.